

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia, lebih dari 50% pendapatan nasional dihasilkan dari sektor pertanian (Ario, 2010). Pentingnya peranan sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah terus meningkatkan peranan sektor pertanian. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat bahwa distribusi PDB atas dasar harga konstan tahun 2000, menyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 kontribusi sektor pertanian yaitu sebesar 4,83%, kemudian pada tahun 2011 sedikit mengalami penurunan menjadi 3,37%. Selanjutnya pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian kembali mengalami peningkatan menjadi 4,20%.

Melihat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan kehidupan petani terutama terhadap petani padi. Menurut Suharto (2009) kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-

badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui peningkatan pendapatan dan pendidikan.

Sejak mengendurnya perhatian pemerintah terhadap pertanian padi setelah dicapainya swasembada beras tahun 1984, kesejahteraan petani padi tampak semakin merosot. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2004 jumlah rumah tangga pertanian pada tahun 2004 adalah 24,3 juta, sekitar 82,7% di antaranya termasuk kategori miskin. Selanjutnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, dapat dilihat besarnya upah riil buruh tani di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 upah riil buruh tani yaitu sebesar Rp 25.960 per hari, kemudian pada tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp 28.817 dan pada tahun 2013 upah buruh tani kembali mengalami penurunan menjadi Rp 27.500 per hari. Pendapatan petani di Indonesia relatif rendah sehingga kesejahteraan petani semakin merosot, petani hidup dalam suasana ketertinggalan dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan (Sastraatmadja, 2006).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah pendapatan. Jhingan (2014), pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan yang menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan. Menurut Hernanto (2004), besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, dan efisiensi

penggunaan tenaga kerja. Apabila pendapatan petani semakin besar maka kesejahteraan petani juga akan meningkat. Agar kesejahteraan petani menjadi lebih baik mereka perlu memperoleh pendapatan yang lebih besar. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi (Soekartawi, 2007).

Selanjutnya berdasarkan sensus pertanian tahun 2003, sebagian besar petani hanya memperoleh penghasilan kurang dari Rp 900.000,00 per bulan untuk menghidupi rata-rata empat orang anggota rumah tangga. Jika sawah yang dikuasai hanya merupakan lahan tadah hujan yang hanya bisa ditanami sekali dalam setahun, petani hanya bisa mengharapkan rezeki Rp 300.000,00 per bulan dari usaha padi di sawahnya. Padahal hasil sensus Pertanian 2003 menunjukkan usaha tanaman padi mendominasi sumber penghasilan utama rumah tangga pertanian.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan petani padi diantaranya yaitu luas lahan. Luas lahan sangat mempengaruhi produksi padi, apabila produksi meningkat, maka kehidupan petani lebih tinggi dan kesejahteraan lebih merata (Trimayuri, 2010). Jika lahan padi semakin luas maka produksi padi akan semakin meningkat dan pendapatan juga semakin meningkat. Sebaliknya apabila luas lahan padi semakin sempit maka produksi padi akan semakin sedikit dan pendapatan petani akan berkurang. Data BPS tahun 2013 menyebutkan bahwa total luas lahan persawahan Indonesia yaitu 8.112.103.00 Ha yang digunakan dalam memproduksi padi.

Kecilnya luas lahan pertanian yang dimiliki oleh petani padi menjadi salah satu faktor penyebab masih tertinggalnya sektor pertanian Indonesia dibanding

negara maju. Rata-rata petani padi di Indonesia memiliki lahan 0,3 hektar per petani khususnya di Pulau Jawa (Hermanto, 2008). Keadaan seperti ini sangat jauh berbeda dengan beberapa negara maju seperti New Zealand, Inggris, Jepang dan Taiwan, kepemilikan lahan pertanian masing-masing petani cukup besar, satu petani bisa memiliki 2,5 hektar bahkan 4,5 hektar dan lebih.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah jumlah produksi padi. Menurut Soekartawi (2007), produksi pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya jenis komoditi, luas lahan, tenaga kerja, modal manajemen, iklim dan faktor sosial ekonomi produsen. Untuk lebih jelasnya Soekartawi (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan atas dua kelompok yaitu:

1. Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan bermacam tingkat kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan dan lain-lain.
2. Faktor sosial ekonomi seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, pendapatan dan lain-lain.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, dapat dilihat bahwa produksi padi Indonesia tahun 2014 sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah produksi padi di Indonesia ini tidak sebanding dengan jumlah permintaan terhadap beras dimana, rata-rata konsumsi beras masyarakat Indonesia adalah 139 kg/kapita/tahun. Konsumsi beras tersebut merupakan yang tertinggi diantara negara Asean lainnya yang rata-rata hanya mengkonsumsi beras sekitar 65 kg/kapita/tahun (Pambudy, 2012). Menurut FAO (2004), rata-rata penduduk Indonesia mengkonsumsi sekitar 200 kilogram beras per kapita per tahun .

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan petani padi adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang membuat masyarakat bersaing dalam dunia kerja, karena diharapkan dengan semakin tinggi pendidikan seseorang, maka produktivitas orang tersebut juga semakin tinggi (Buranda, 2015). Begitu juga dalam bidang pertanian dengan penggunaan penerapan teknologi dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi telah banyak dilakukan. Khusus teknologi pada aspek budidaya menyangkut pengaturan air, pemupukan yang tepat dan pemeliharaan telah diupayakan dengan berbagai metode atau cara dengan harapan dapat meningkatkan produksi lahan. Selain itu juga dengan upaya penyerapan teknologi pengaturan jarak tanam dilakukan yang berorientasi pada peningkatan populasi tanaman per satuan luas lahan sehingga memungkinkan juga peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani (Sucipto, 2011).

Hingga saat ini minat remaja dan pemuda Indonesia untuk memasuki dunia pertanian masih sangat minim, mengingat pendapatan petani yang masih sangat rendah dibanding profesi lainnya. Sekolah pertanian dan Fakultas pertanian jumlahnya masih sangat sedikit. Lulusannya pun rata-rata tidak terjun langsung ke sawah ataupun ladang. Para alumninya lebih banyak bekerja di kantor dibanding menjadi inovator di lapangan. Gatot Irianto (2010), menyatakan bahwa 75% tingkat pendidikan petani Indonesia tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 24% lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta hanya 1% lulus perguruan tinggi. Pernyataan tersebut didukung oleh data yang berasal dari BPS (2011), menyatakan bahwa 70% – 80% petani di Indonesia hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak bersekolah.

Salain pendidikan diduga kebijakan pemerintah juga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi

keputusan produsen, konsumen dan para pelaku pemasaran agar terlaksana pembangunan pertanian sesuai dengan yang direncanakan (Hanafie, 2010). Apabila biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan di bidang pertanian besar maka diharapkan semakin meningkat pula kesejahteraan petani padi (Sukirno, 2013).

Akhir-akhir ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan Impor beras seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintah sekali lagi telah gagal dalam membela nasib kalangan para petani. Selain itu, masih sangat banyak petani yang hidup secara subsisten, dengan mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri (Gautama, 2005). Khususnya para petani yang luas tanah dan sawahnya sangat kecil, atau buruh tani yang mendapat upah berupa pangan, seperti padi, jagung, ataupun ketela. Masalah mengenai kesejahteraan petani adalah permasalahan yang harus benar-benar diselesaikan secepat mungkin oleh pemerintah agar jumlah rakyat miskin di Indonesia tidak terus bertambah.

Indonesia tergolong negara agraris, maka produk nasional sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki struktur perekonomian yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani, dengan daerah persawahan dan perladangan yang luas maka pada umumnya pertanian yang diusahakan adalah pertanian tanaman pangan terutama tanaman padi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (2010), dapat dilihat bahwa distribusi sektor pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap PDRB Sumatera Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000 sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 yaitu sebesar 10,3%, kemudian pada tahun 2008 mengalami

peningkatan menjadi 10,40% dan pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan menjadi 10,79%. Melihat besarnya kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan kehidupan petani terutama terhadap petani padi.

Kesejahteraan petani dapat diukur melalui tingkat pendapatan petani. Pendapatan rata-rata petani padi berdasarkan laju pertumbuhan PDRB perkapita harga berlaku dengan tahun dasar 2008, diperoleh nilai pendapatan perkapita sebesar Rp. 14,1 juta. Selanjutnya, bila diasumsikan bahwa kurs mata uang dollar adalah Rp. 9.000,00 maka nilai pendapatan perkapita Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2010 diperkirakan sekitar US \$ 1.532 atau petani memperoleh pendapatan sekitar Rp 40.000,00 per hari.

Selanjutnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (2007), luas lahan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 43,723.00 Ha dengan tingkat kemampuan produksi padi/beras pada tahun 2004 mencapai lebih dari 75.000 ton kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 80.000 ton.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Lima Puluh Kota dalam angka 2012, jumlah produksi padi pada tahun 2012 sebesar 218.542,00 ton dengan rata-rata produksi perhektar sebesar 4,75 ton/ha, terjadi penurunan sebesar 2,37 persen jika dibandingkan dengan produksi tahun 2011. Pada tahun 2012 seluruh produksi padi merupakan produksi dari padi sawah.

Tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan petani di Indonesia pada umumnya, rata-rata tingkat pendidikan petani di Kabupaten Lima Puluh Kota masih relatif rendah. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih

fokus terhadap penyediaan pendidikan kejuruan yang unggul, khusus dibidang pertanian, peternakan dan agribisnis yang didukung oleh teknologi industri. Unggulan kejuruan adalah untuk menyediakan tenaga terampil madya untuk bidang-bidang yang berkembang, seperti pengolahan pertanian moderen.

Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi keputusan produsen, konsumen dan para pelaku pemasaran agar terlaksana pembangunan pertanian sesuai dengan yang direncanakan (Hanafie, 2010). Apabila biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan di bidang pertanian besar maka diharapkan semakin meningkat pula kesejahteraan petani padi (Sukirno, 2013).

Salah satu nagari yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani adalah nagari sariék laweh yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Sariék laweh adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan di nagari sariék laweh adalah sektor pertanian. Selanjutnya pada tahun 2011 sekitar 80% (2.312 orang) dari 2.169 jumlah penduduk yang bekerja, menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, artinya, jika bukan karena sektor pertanian, angka pengangguran di Nagari Sariék Laweh dipastikan mengalami peningkatan (Alis, 2011). Dari hasil survey yang dilakukan, terdapat sekitar 1050 orang yang bekerja sebagai petani sawah yang tergabung dalam 20 kelompok tani yang tersebar di 7 jorong dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 50.000 per hari.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Sariek Laweh lebih kurang memiliki luas daerah sekitar 2041 Ha dengan tipologi perbukitan yang melintang dari utara ke selatan dan membentang dari arah Barat ke arah timur berupa lurah/ngarai, parit-parit, perkebunan-ladang, perumahan dan persawahan. Berdasarkan penelitian lapangan, rata-rata petani di Sariek Laweh memiliki lahan sawah 250 M<sup>2</sup> perorang, dengan luas lahan yang tidak terlalu besar maka jumlah produksi padi yang dihasilkan petani hanya berkisar antara 100-400 M<sup>2</sup> setiap kali panen.

Tingkat pendidikan petani di Nagari Sariek Laweh juga masih sangat rendah, berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan rata-rata tingkat pendidikan petani hanya tamatan SD dan SMP, sehingga mereka sulit untuk menerima kemajuan teknologi dan mengembangkan sistem pertaniannya. Selanjutnya kebijakan pemerintah, hanya sebagian kecil dari masyarakat Sariek Laweh yang bisa merasakan bantuan di bidang pertanian seperti pupuk, benih dan alat-alat pertanian yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani padi dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Padi (Studi Kasus di Nagari Sariek Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah pengaruh luas lahan, jumlah produksi, tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani padi di Nagari Sariék Laweh kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani padi. Dimana variabel-variabel yang digunakan adalah luas lahan, jumlah produksi, tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh luas lahan, jumlah produksi, tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani padi.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi serta sebagai media latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Bagi Universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
4. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat segala keputusan.

5. Bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait, dapat dijadikan sebagai rujukan serta tambahan informasi.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sariek Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pengaruh luas lahan, jumlah produksi, tingkat pendidikan, dan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani padi di Nagari Sariek Laweh. Dalam penelitian ini digunakan data primer dengan melakukan penelitian langsung menggunakan kuisisioner dan wawancara terhadap responden. Responden dalam penelitian ini yaitu petani padi di Nagari Sariek Laweh.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan, Bab VI Penutup.

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan defenisi operasional, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, selain itu dalam bab ini juga terdapat ruang lingkup penelitian, serta pada akhir bab ini dilakukan pengolahan data.

Bab IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan tentang kesejahteraan petani padi di Nagari Sarik Laweh.

Bab V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah di teliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam penelitian ini.

Bab VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.